

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim dianggap menjadi salah satu permasalahan utama global yang mendalam karena berbagai kondisi iklim menjadi masalah utama yang terjadi menurut World Economic Forum (2025) *“The risks associated with extreme weather events also is a key concern for the year ahead, with 14% of respondents selecting it.”* Perubahan iklim saat ini semakin terlihat jelas ancaman yang terjadi. Ancaman, risiko dan dampak ke berbagai sektor global dalam skala yang besar membutuhkan perhatian yang mendesak bagi umat manusia (Feulner, 2017). Hal ini terlihat dari temuan survei yang menempatkan *heatwaves across parts of Asia; flooding in Brazil, Indonesia and parts of Europe; wildfires in Canada; and hurricanes Helene and Milton in the United States are just some recent examples of such events* (World Economic Forum, 2025). Dari kondisi tersebut perubahan iklim menjadi realitas yang sudah dihadapi masyarakat global saat ini dan terus berdampak buruk ketika tidak ada langkah mitigasi yang progresif dilakukan.

Dampak perubahan iklim kini semakin menjadi sorotan bagi masyarakat global termasuk Indonesia karena sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati, Indonesia memiliki peluang sekaligus tantangan yang sangat besar dalam menghadapi situasi perubahan iklim (Muttaqin et al., 2019). Konsekuensi dari fenomena ini berdampak pada pembangunan nasional seperti bencana alam dan masalah kesehatan masyarakat (S & Faizal, 2025). Hal tersebut menjadi tantangan yang kompleks karena pemanfaatan sumber daya harus dilakukan dengan memikirkan prinsip keberlanjutan, keseimbangan aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya yang tepat akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dalam aspek ekonomi, lingkungan dan sosial, pengelolaan sumber daya alam yang baik akan membuka lapangan pekerjaan, sehingga nantinya akan meningkatkan pendapatan keluarga secara signifikan dan akan mendorong keberlanjutan partisipasi aktif masyarakat.

Dalam merespons hal tersebut pemerintah menginisiasi Program Kampung Iklim (ProKlim) untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi situasi perubahan iklim. Berkenaan dengan pengertian Program Kampung Iklim mengacu pada (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim, 2016) Program Kampung Iklim adalah inisiatif nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam memperkuat kapasitas adaptif terhadap dampak perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Program ini juga berfungsi untuk mengakui dan menghargai upaya lokal dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lokal sesuai dengan keadaan regional. Hal ini menjadi langkah yang tepat untuk pemerintah dapat membuat program yang tidak hanya mengembangkan potensi lokal, tetapi juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat, sehingga pengembangan-pengembangan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan lokal agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian program yang akan dilakukan tidak hanya berjalan sementara tetapi juga akan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Kondisi yang terjadi di beberapa daerah desa peserta ProKlim menghadapi tantangan keberlanjutan program, yang seringkali sampai pada tingkatan formal karena komunikasi yang dilakukan terbatas, kondisi ini berdampak pada keterlibatan masyarakat dalam program (S & Faizal, 2025). Hal ini sesuai dengan temuan awal di lapangan dan yang disampaikan langsung oleh dinas terkait bahwa dukungan pemerintah terhadap ProKlim belum optimal, karena akses jarak yang ditempuh cukup jauh menjadi salah satu kendala utama sehingga pendampingan yang dilakukan terbatas, kondisi ini diperburuk dengan kurangnya sumber daya yang ada, baik dari segi tenaga, fasilitas maupun anggaran menyebabkan pendampingan yang dilakukan belum berjalan optimal. Sementara kapasitas masyarakat sangat bergantung kepada peran pemerintah, akibatnya inisiatif masyarakat dalam menjalankan program menjadi rendah.

Keberlanjutan Proklam tidak hanya dipengaruhi oleh pemerintah sebagai penunjang keberlangsungan program, melainkan juga dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada, karena pengembangan potensi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal akan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Lebih lanjut ini menjadi dasar yang kuat untuk program dapat dilakukan secara berkelanjutan, karena masyarakat akan merasa diakui keberadaannya serta merasa dilibatkan dalam perencanaan program dan pelaksanaan program, hal ini diperkuat oleh Safrina et al. (2022) bahwa tentunya keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan. Oleh karena itu memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam adaptasi dan mitigasi iklim, yang pada akhirnya meningkatkan keberlanjutan program (Faedlulloh et al., 2019).

Partisipasi masyarakat dalam program ProKlim, sering kali mengalami penurunan partisipasi setelah meraih penghargaan, karena motivasi masyarakat yang kian melemah dan menurunnya keterlibatan masyarakat sehingga inisiatif yang dilakukan masyarakat berkurang (Risako Ishii, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa setelah menerima penghargaan, banyak kelompok masyarakat cenderung menurunkan kegiatan rutin seperti kerja bakti, perawatan fasilitas lingkungan, dan kegiatan adaptasi-mitigasi perubahan iklim sehingga komitmen terhadap program mulai melemah. Menurut Uphoff (1992) keberlanjutan partisipasi masyarakat sangat bergantung pada kesadaran bersama, ketika partisipasi masyarakat hanya dimotivasi oleh insentif eksternal atau simbolik penghargaan, maka kesadaran tersebut menjadi rapuh dan mudah hilang ketika dukungan eksternal menurun. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak lagi merasakan keterikatan maupun tanggung jawab terhadap program, tingkat partisipasi berangsur melemah dari sekadar kehadiran simbolik menjadi ketidakpedulian terhadap keberlanjutan kegiatan, sedangkan partisipasi masyarakat merupakan inti dari keberlanjutan program, karena melalui keterlibatan aktif, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam menjaga, mengembangkan, dan menyesuaikan program sesuai kebutuhan lokal. Oleh sebab itu, menjaga partisipasi masyarakat yang berlandaskan kesadaran dan rasa memiliki

menjadi prasyarat penting agar setiap inisiatif pembangunan dapat berjalan konsisten dan memberikan dampak jangka panjang.

Selaras dengan pandangan tersebut, studi di Sudan Selatan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat secara signifikan memengaruhi keberlanjutan program. Keterlibatan masyarakat sejak tahap inisiasi hingga penyelesaian program tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*), tetapi juga menjamin keberlanjutan manfaat yang dihasilkan, ini menegaskan bahwa keberlanjutan program tidak semata-mata bergantung pada dukungan finansial atau teknis, melainkan pada sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan serta pemanfaatan sumber daya lokal (Loparimoi & Ng'eno, 2023).

Kondisi ini diperburuk dengan peran pemerintah yang tidak konsisten, berkomitmen dan berubah ubah menjadi penghambat dalam keberlangsungan partisipasi masyarakat (Nkansa & Chapman, 2006). Kondisi tersebut dapat menurunkan partisipasi dan kesadaran masyarakat yang dapat melemahkan keberlanjutan program sehingga masyarakat menjadi semakin tidak konsisten. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah dalam memberikan dukungan yang optimal melalui sumber daya, kebijakan dan aturan yang mendukung. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui teori strukturasi Anthony Giddens, yang dapat menjelaskan keberlanjutan program ditentukan oleh interaksi antara struktur dan agensi.

Pendekatan teori Strukturasi Anthony Giddens memberikan konseptual yang relevan dengan fenomena tersebut. Menurut Giddens (1984) dalam penelitian Chatterjee et al. (2019). Struktur dapat di pahami melalui tiga dimensi yaitu *signifikasi* (makna dan simbol) *legitimasi* (norma dan aturan) serta *dominasi* (penggunaan sumber daya dan kekuasaan). Dapat diartikan bahwa struktur tidak hanya memiliki peran sebagai aturan formal dan tertulis. Dalam konteks Proklamasi struktur sebagai kebijakan pemerintah, aturan pelaksanaan dan dukungan sumber daya selama keberlangsungan program.

Sementara itu konsep agensi menurut Giddens (1984) dalam Chatterjee et al. (2019). Menekankan bahwa kapasitas individu atau masyarakat dapat dipandang sebagai aktor reflektif dan rasional, yang memiliki kesadaran diskursif

(pengetahuan yang dapat dijelaskan secara verbal) serta kesadaran praktis (pengetahuan yang diwujudkan dalam rutinitas). Hal ini terlihat dalam partisipasi masyarakat pada kegiatan ProKlim, bahwa partisipasi aktif masyarakat belum menyeluruh dalam setiap proses kegiatan ProKlim. Sebagian masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan, namun pada saat tindak lanjut kegiatan hanya sedikit yang berpartisipasi. Dengan demikian, rendahnya inisiatif terlihat menandakan bahwa partisipasi aktif masyarakat belum berkelanjutan dan kondisi tersebut dapat mencerminkan bahwa kesadaran praktis melalui keterlibatan rutin sudah mulai terbentuk sementara kesadaran diskursif yakni kemampuan untuk merefleksikan dan memahami tujuan program masih perlu diperkuat agar ProKlim dapat berkelanjutan secara konsisten.

Lebih lanjut, dalam Konsep *Duality of Struktur* Menurut Giddens (1984) merupakan inti dari teori strukturasi yang bertujuan untuk menjembatani antara struktur sosial yang bersifat objektif seperti (aturan, norma) dan agensi manusia yang bersifat subjektif mencakup kapasitas individu atau kelompok untuk bertindak dan memberi makna atas tindakannya. Giddens menegaskan bahwa struktur bukan hanya membatasi tindakan tetapi juga sebagai sarana yang memungkinkan tindakan sosial terjadi. Oleh karena itu struktur dan agensi memiliki hubungan timbal balik yang saling berkaitan dan membentuk satu sama lain. Hal ini ditegaskan oleh Spaargaren dan Mommaas (2006) bahwa struktur dan agensi saling bergantung dan saling membentuk timbal balik struktur dan agensi. Dalam konteks ProKlim struktur berupa dukungan pemerintah dalam memberikan dasar yang kuat untuk masyarakat. Sementara agensi berupa kesadaran dan inisiatif masyarakat dalam bertindak. Dengan demikian keberlanjutan ProKlim sangat ditentukan oleh sinergi antara struktur yang memberikan arahan sedangkan agensi yang mewujudkan dalam bentuk tindakan nyata.

Dengan perspektif ini, analisis mengenai hubungan antara struktur (aturan, norma) dan agensi (kesadaran serta tindakan masyarakat) menjadi sangat penting untuk menjelaskan mengapa keberlanjutan ProKlim di beberapa desa dapat berjalan sementara di beberapa desa lainnya hanya bertahan pada tahap formalitas. Kajian berbasis teori strukturasi dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai

dinamika yang mempengaruhi keberhasilan maupun faktor-faktor yang mempengaruhi keterbatasan ProKlim.

Berdasarkan temuan literatur, dapat dilihat bahwa sebagian besar penelitian yang sudah dilakukan mengenai Program Kampung Iklim (Hermanto, 2023; Kharima et al., 2025; Khoiruumah et al., 2024) hanya berfokus pada aspek partisipasi masyarakat, kolaborasi multi pihak (Ramdani & Resnawaty, 2021), serta peran *stakeholder* melalui *collaborative governance* (Kurniawan et al., 2024). Temuan-temuan tersebut menegaskan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dan dukungan stakeholder dalam menunjang keberhasilan ProKlim. Dengan demikian penelitian yang sudah dilakukan hanya membahas partisipasi secara deskriptif tanpa melibatkan dinamika antara struktur dan agensi yang mempengaruhi keberlanjutan program, selain itu sebagian penelitian hanya membahas secara spesifik satu aktor seperti perempuan atau *stakeholder* tertentu, sehingga belum menjelaskan secara komprehensif bagaimana kebijakan, aturan, serta sumber daya (struktur) berinteraksi dengan kesadaran dan tindakan masyarakat (agensi) dalam mempengaruhi keberlanjutan ProKlim. Dengan demikian ini menjadi ruang penelitian untuk dapat mengkaji keberlanjutan ProKlim karena kajian mendalam mengenai analisis interaksi antara struktur dan agensi dalam membentuk praktik sosial keberlanjutan ProKlim masih terbatas. Melalui perspektif teori strukturalis Anthony Giddens yang dapat menganalisis secara mendalam mengenai timbal balik antara struktur dan agensi dalam menjaga keberlanjutan partisipasi masyarakat.

Studi-studi sebelumnya menjelaskan bahwa keberhasilan Program Kampung Iklim, sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat dan dukungan *stakeholder*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Kharima et al., 2025; Khoiruumah et al., 2024) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat, termasuk kelompok perempuan, memainkan peran penting dalam tahapan ProKlim yang dilakukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan et al., 2024; Ramdani & Resnawaty, 2021) menjelaskan pentingnya kolaborasi multipihak, pemerintah, dunia usaha dan komunitas lokal sebagai pendukung keberhasilan ProKlim. Temuan-temuan ini terbentuk Gambaran bahwa keberhasilan ProKlim tidak dapat dilepaskan dari

partisipasi masyarakat secara aktif maupun dukungan berbagai pihak yang mempunyai peran dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Dengan demikian penelitian sebelumnya berfokus pada aspek partisipasi atau kolaborasi, tanpa menjelaskan lebih jauh mengenai dinamika hubungan antara struktur-agensi dalam keberlanjutan praktik sosial ProKlim, sehingga dapat menjadi ruang untuk pengembangan analisis teoritis yang lebih mendalam. Oleh karena itu penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dalam penggunaan teori Strukturasi Anthony Giddens untuk keberlanjutan praktik sosial dalam ruang lingkup Program Kampung Iklim. Dengan demikian penelitian ini akan menjadi menarik untuk dibahas oleh peneliti karena melihat sejauh mana dinamika interaksi antara struktur sebagai pemberi dukungan dan agensi yang bertindak dalam membentuk praktik sosial berkelanjutan melalui Program Kampung Iklim.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan pada cara pandang dalam menganalisis keberlanjutan Program Kampung Iklim berdasarkan teori strukturasi Anthony Giddens. Pertama, penelitian ini menempatkan kesadaran masyarakat sebagai agensi yang perlu dikaji secara mendalam dengan konteks ProKlim di lokasi penelitian. Kedua, penelitian ini membahas peran pemerintah sebagai struktur yang membentuk praktik sosial keberlanjutan Program Kampung Iklim. Ketiga, penelitian ini menegaskan bahwa masyarakat sebagai agen yang mempunyai kapasitas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga nantinya ProKlim tidak hanya sampai tahap formalitas saja akan tetapi dapat berkembang menjadi praktik sosial yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Analisis Keberlanjutan Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Teori Strukturasi Anthony Giddens pada Program Kampung Iklim di Dusun Babakan Desa Jalatrang Kabupaten Ciamis?”

1.3 Definisi Operasional

1.3.1 Analisis Keberlanjutan Partisipasi

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan keberlanjutan partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ProKlim secara konsisten. Contohnya pada awal kegiatan ProKlim yang dilaksanakan partisipasi masyarakat berjumlah 20 orang, namun pada saat tindak lanjut kegiatan partisipasi masyarakat berkurang menjadi 5 orang. Dengan demikian ini menunjukkan bahwa adanya penurunan partisipasi saat tindak lanjut artinya keberlanjutan partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan secara konsisten.

1.3.2 Teori Strukturasi Anthony Giddens

Teori Strukturasi pada penelitian ini dilihat dari interaksi antara struktur (dukungan dinas dan aturan desa) dengan agensi (kesadaran dan tindakan masyarakat). Contohnya adanya dukungan yang diberikan oleh dinas dalam bentuk barang dan materi, sehingga masyarakat terdorong dalam melakukan tindakan dengan dibarengi dengan kesadaran yang meningkat. Dengan demikian ini menunjukkan bahwa struktur dan agensi selaras dalam membentuk praktik sosial.

1.3.3 Program Kampung Iklim

Pada penelitian ini Program Kampung Iklim merupakan program yang diinisiasi oleh pemerintah untuk mempersiapkan desa menghadapi perubahan iklim berbasis masyarakat. Contohnya kegiatan ProKlim dalam tindakan nyata adaptasi dan mitigasi perlunya keterlibatan masyarakat berpartisipasi. Oleh karena itu program ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas masyarakat tentang perubahan iklim

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui Analisis Keberlanjutan Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Teori Strukturasi Anthony Giddens pada Program Kampung Iklim di Dusun Babakan Desa Jalatrang Kabupaten Ciamis.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dan kegunaan sesuai yang diharapkan oleh peneliti, demikian beberapa kegunaan penelitian baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan pendidikan masyarakat yang berhubungan dalam studi keberlanjutan dengan perspektif strukturasi dan menjadi sebuah referensi studi keberlanjutan program kampung iklim sebagai bahan kajian penelitian di masa yang akan datang.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan pengetahuan mengenai Analisis Keberlanjutan Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Teori Strukturasi Anthony Giddens

1.5.2.2 Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang objektif bagi pengambil kebijakan dan pelaksana Program Kampung Iklim dalam mendorong keberlanjutan ProKlim.

1.5.2.3 Bagi Universitas Siliwangi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan penelitian dalam bidang pendidikan masyarakat khususnya mengenai studi keberlanjutan Program Kampung Iklim.